

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ricardo Simanjutak, *Hukum Kepailitan: Teknik Penyelesaian Utang Kreditur*. (Jakarta: Prenada Media, 2019)

Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. (Jakarta: Kencana, 2019)

Soedeson Tandra . *Hukum Kepailitan kertas kerja kurator dan Pengurus*, (Jakarta: 2021)

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* (Jakarta: Prenada Media, 2021)

Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019)

### B. Hasil Penelitian

Adinda Panca Gusti, N. *TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PADA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK* (Studi Putusan Nomor 289/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Jkt. Pst) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Habeahan, B, “*Tinjauan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kreditor Menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004.*” (skripsi, nommensen)

Jamal, D.W, “*Penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Perjanjian Kredit antara bank dengan nasabah*”. Skripsi, Semarang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Unissula

Putri D.M, “*Penloakan Permohonan PKPU dengan alasan tidak memenuhi syarat sederhana karena adanya gugatan perdata yang lain*”. Disertasi, Makassar: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Hassanudin.

Sihotang, J. “*Tugas dan Wewenang Pengurus PKPU Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Wicaksono, B. W, “*Analisis terhadap kasus penundaan kewajiban pembayaran utang pada PT. Garuda Indonesia Persero Tbk*”. (Skripsi, Surakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas)

### **C. Jurnal Ilmiah**

Amrullah, A. H., Asyidqi, A. T., Suwandi, J., Alifa, A. R., Oktaviani, N. G., & Suryanti, N. “*Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*”. *Bulletin of Community Engagement*

Johnson, “*Aviatan Law Review*”, *Internasional Journal of Law*

Kementerian BUMN. “*Kebijakan Restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*”. Jakarta: Kementerian BUMN.

Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2021

Mamangkey, R. “*Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Pemberesan Harta Pailit*”. *Lex et Societatis*, 3(2).

Septiani, V.N., “*Akibat hukum Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas Perusahaan Asuransi ke Pengadilan Niaga yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memiliki Legal Standing*”. *Jurnal*, 7(2)

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Tata Cara Restrukturisasi BUMN

### **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103 K/Pdt.Sus-Pailit/2013

## F. Website

Muhammad Teguh Pangestu, “Covid-19 sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian dan Implikasinya terhadap Perjanjian”  
<https://law.uui.ac.id/blog/2020/06/17/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/#:~:text=Lain%20halnya%2C%20meskipun%20para%20pihak,tersebut%20dengan%20a%20lasan%20Covid%2D19.>

Garuda Indonesia, “Tentang Garuda Indonesia”. <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/corporate-partners/company-profile/about/index#%3A~-%3Atext%3DSebagai%20maskapai%20pembawa%20bendera%20bangsa%2Cmengadaptasi%20nuansa%20>

Nafiatul Munawaroh, “8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum menurut Para Ahli”.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>

IDN Times, “18 Pengertian Akuntabilitas Menurut Para Ahli”.  
<https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern-ida-times/18-pengertian-akuntabilitas-menurut-para-ahli?page=all>

Hukum Online, “Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>

Hukum Online, “Perbedaan Kreditur Separatis, Preferen dan Konkuren”.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-kreditur-separatis--preferen--dan-konkuren-lt5ddba1429abab/>

PT. Mitra Buana Koorporindo, “Tentang PT Mitra Buana Koorporindo”  
<https://mbk.co.id/en/about>

PT. Garuda Indonesia, “Profile Perusahaan” <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/corporate-partners/company-profile/index>

PT. Garuda Indonesia, “Laporan Keuangan Garuda Indonesia 2021”  
<https://www.garuda-indonesia.com/id/id/investor-relations/financial-report-and-presentations/financial-report/index>

PT. Garuda Indonesia, “Laporan Kinerja Operasional Garuda Indonesia (2019)”  
<https://www.garuda-indonesia.com/id/id/investor-relations/company-data/monthly-operating-data/index>

G.P.Aji Wijaya, “Peran Pengurus dalam Resturisasi  
[https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-pengurus-dalam-restukturisasi-  
utang-i-hol6402/?page=4](https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-pengurus-dalam-restukturisasi-utang-i-hol6402/?page=4)

Teti Purwanti, “Sah, Garuda Indonesia Disuntuk Jokowi Rp 7.5 T”.  
[https://www.cnbcindonesia.com/market/20221220101237-17-398409/sah-garuda-  
indonesia--giaa--disuntik-jokowi-rp-75-t](https://www.cnbcindonesia.com/market/20221220101237-17-398409/sah-garuda-indonesia--giaa--disuntik-jokowi-rp-75-t)

